



EMBERISASI SOLUSI DARURAT SAMPAH

Efisiensi, Pengadaan Pakai CSR Tak Gunakan APBD

JOGJA - Program emberisasi atau ember bekas untuk memilah sampah organik basah jadi solusi Pemkot Jogja. Program itu dipastikan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jogja.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, dalam menjalankan program emberisasi bekerjasama dengan swasta. Yakni melalui program *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan, sumbangan sukarela dari berbagai pihak. Tidak digunakannya APBD karena ada arahan dari pemerintah pusat untuk efisiensi. "Selain itu, ember yang digunakan merupakan barang bekas. Sehingga tidak dibeli menggunakan anggaran pemerintah," ungkapnya, saat ditemui di Balai Kota Jogja, Rabu (17/9).

Menurut Hasto, ada 2.220 ember yang didistribusikan dalam program emberisasi. Rinciannya 1.000 ember diberikan di tingkat RW dengan dua ember per titik. Sementara 1.200 ember sisanya diberikan kepada penggrob dengan pembagian dua ember per gerobak.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja Aman Yuridi Jaya menambahkan, timbul sampah di Kota Jogja mencapai 300 ton per hari. Dari jumlah itu 60 persen atau sekitar 180 ton merupakan sampah organik. Kemudian dari 180 ton ada 100 ton sampah organik yang berpotensi bisa diolah.

Pemkot Jogja berencana membentuk pengelolaan sampah organik basah dengan kerjasama sektor peternakan. Misalnya untuk pakan ternak di wilayah kabupaten Sleman dan Bantul. Pada tahap awal pihaknya menarget bisa mereduksi 60 ton sampah organik basah. Upayanya dilakukan dengan melibatkan penggrob. Melalui skema per penggrob membiaya 50 ton sampah.

"Jika dikalikan 1.200 gerobak, maka potensi reduksi mencapai 60 ton per hari," ungkapnya. (inu/pr/f)

Khawatir Depo Penuh Belatung dan Lalat

PROGRAM emberisasi untuk memilah sampah organik basah mendapat sorotan dari penggrob. Ketua Paguyuban Penggrob Depo Utoroloyo Tompeyan, Tegalejo, Tupardi mengaku, belum mendapat sosialisasi terkait program ember sampah organik.

Namun jika program tersebut berjalan, menurutnya pengangkutan sampah oleh pemkot harus dilakukan rutin.

Sebab jika dibiarkan terlalu lama di depo justru akan me-

nambah beban bagi penggrob. Lantaran sampah organik cenderung mudah busuk dan tidak bisa diolah. "Khawatirnya depo penuh belatung dan lalat sekalgus berbau tidak sedap," ujar Tupardi saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Rabu (17/9).

Selain soal skema pengangkutan ember sampah organik, Tupardi juga meminta pemkot mensosialisasikan program pemilahan sampah hingga ke hulu. Sebab selama ini penggrob di Depo Utoroloyo masih banyak menerima sampah yang belum terpilah. Misalnya sampah organik maupun anorganik dari pelanggan masih dijadikan dalam satu kantong plastik.

Tupardi mengaku, penggrob juga tidak mungkin untuk memilah sampah. Sebab tugas penggrob hanya mengambil sampah dari pelanggan lalu membawanya ke depo. "Sehingga harus ada upaya dari pemerintah untuk menyadarkan masyarakat supaya memilah," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan, program ember akan menyusur masyarakat di seluruh Kelurahan. Program tersebut bertujuan untuk memilah sampah organik basah yang agar tidak masuk ke depo. Adapun sampah organik basah merupakan sisa makanan. Misalnya seperti limbah dapur rumah tangga, restoran, hingga angkringan. Sampah jenis itu rencananya akan dikerjasamakan dengan peternak sebagai pakan. (inu/pr/f)

KEMANDIRIAN PENGELOLAAN SAMPAH

- Kota Yogyakarta diharapkan bisa mengelola sampah secara mandiri pada tahun 2027.
- Sampah yang masuk ke TPA Pyungan mencapai 90 ton per hari hingga pertengahan September 2025.
- TPA Pyungan diperkirakan akan penuh pada Januari 2026 dan tidak akan lagi menerima sampah dari kabupaten/kota. Sampai akhir 2025, masih ada kuota sisa sekitar 2.400 ton untuk Kota Yogyakarta.



Kuota Tinggal 2.400 Ton, Semuanya untuk Kota Jogja

pihaknya telah berkoordinasi dengan Kota Jogja bahwa sampah masih bisa digeser ke TPA Pyungan sampai akhir tahun 2025. "Kami berperan untuk kondisi darurat semacam ini, kalau ada hal hal keaduratan kami bisa bawa ke Pyungan," ujarnya.

Di sisi lain, menyadari kondisi TPA Pyungan semakin lama semakin sedikit daya tampungnya. Sedangkan timbulan sampah semakin banyak. Ia kemudian mengimbau agar masyarakat meminimalisasi sampah di rumahnya.

Menurutnya, hingga saat ini Kota Jogja belum bisa mengelola sampahnya secara mandiri. Menuju kemandirian tersebut perlu proses yang cukup panjang. Sampai pertengahan September, ada 90 ton sampah yang masuk ke TPA Pyungan per hari. "(Kota Jogja) belum mandiri, harapan ke depan bisa mandiri, paling tidak sampai 2027," jelasnya.

DLHK DJJ menargetkan mulai Januari 2026 di TPA Pyungan sudah tidak menerima sampah di kabupaten/kota. Hal itu karena secara teknis TPA Pyungan sudah penuh. Namun, masih memungkinkan menampung sampah sampai akhir 2025. "Tapi dalam kondisi kondisi tertentu. Artinya ada keterbatasan jumlahnya juga, jadi tidak semua sampah digeser kesana," jelasnya.

Sisa kuota sampah di TPA Pyungan sampai akhir tahun ini hanya sekitar 2.400 ton. Seluruh kuota tersebut sudah diberikan kepada Kota Jogja karena yang masih bermasalah di sana. "Semuanya untuk kota, Sleman dan Bantul kami alokasikan di luar situ," bebernya. (oso/pr/f)



GOVERNUR

DJI Hamengku

Burwono X (HB X)

menyebut perhatian

terkait darurat sampah

di Kota Jogja. Setelah pen-

gurangan kuota sampah yang

dibawa ke Tempat Pengolahan

Akhir (TPA) Pyungan. Itu ter-

jadi ketika HB X dan Kepala

Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebutuhan (DLHK) DJJ Kusno

Wibowo hadir di acara pen-

anaman pohon program Rukhi

Bumi di Kompleks Kepatihan,

Jogja, Rabu (17/9).

"Gimana kemarin akhirnya,

(sampah kota) bisa masuk?"

(TPA Pyungan)," tanya HB X

kepada Kusno Wibowo yang

sedang mendampingi. Sempat

kaget saat ditanya mendadak,

Kusno menjawab, hasil kemun-

ikasasi, sampah di Kota Jogja

bisa masuk ke TPA Pyungan

sampai akhir tahun. HB X ber-

harap agar jangan sampai ada

sampah yang menumpuk di

depo-depo Kota Jogja. Seperti

kasus sebelumnya yang terja-

di di Depo Mandala Krida.

"Jadi saya minta untuk masuk

aja di TPA Pyungan, kota me-

ngambil karena tidak punya

lahan."

Dikonfirmasi setelah acara,

Kusno Wibowo menjelaskan,

terdapat tiga tahapan dalam

pengelolaan sampah melipu-

ti jangka oendek, menengah

dan panjang, jangka pendek,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005